

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**
*(Studi pada PT. BPR LPN Taeh Baruah Kecamatan
Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :
YANTI ERITAMA
02140013

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2007**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA
BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**
(Studi pada PT. BPR LPN Taeh Baruah Kecamatan
Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)

ABSTRAK

(Yanti Eritama, Fakultas Hukum Unand, 67 Halaman, 2007)

Keberadaan perbankan saat ini sangat berpengaruh besar kepada perekonomian rakyat. Sebagaimana kita ketahui perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Banyaknya bank yang berdiri ahir-ahir ini salah satunya adalah BPR yang berdiri di daerah-daerah memberi pengaruh yang besar terutama bagi pengusaha. Dimana rakyat dapat meminjam uang dalam bentuk kredit untuk menjalankan usahanya. Pendirian BPR ini harus melewati beberapa prosedur izin pendirian yang di peroleh dari Bank Indonesia (BI) sebagai mana yang di jelaskan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sejalan dengan otonomi daerah sekarang ini apakah pengurusan izin pendirian BPR masih dilakukan ke pusat.

Permasalahan yang dikemukakan penulis dalam skripsi ini yaitu apa saja jenis izin yang harus dimiliki oleh PT. BPR LPN Taeh Baruah pada saat pendiriannya. Bagaimana pelaksanaan pengurusan izin pendirian PT. BPR LPN Taeh Baruah.

Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dimana pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan kenyataan yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Jenis penelitian yang di lakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa izin yang harus dimiliki oleh PT. BPR LPN Taeh Baruah berasal dari BI yaitu Izin Usaha / Persetujuan Prinsip dan izin yang berasal dari Pemerintah Daerah yaitu Izin Mendirikan Bangunan, Pengukuhan Badan Hukum, Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha serta Tanda Daftar Perusahaan. Pelaksanaan izin pendirian BPR ini dalam prosesnya mengalami kemudahan karna pada saat pendirian terdapat kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Pada awalnya Gubernur merekomendasikan pendirian LPN setelah maju barulah dikembangkan menjadi BPR dan ini pun mendapat kemudahan pada waktu itu di keluarkan Paket Oktober 1988. sedangkan izin yang berasal dari Pemerintah Daerah juga tidak ada hambatan karna BPR sangat memberi dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.¹

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur trilogi pembangunan adalah perbankan. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dan proses berkembangnya perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kongkrit.

Oleh karena itu peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien berdasarkan demokrasi ekonomi dengan lebih mendukung dan memperhatikan sektor perekonomian

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 2002, Sinar Grafika, Hal 35

masyarakat dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Salah satu yang dituju dalam pelaksanaan trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan, hal ini dapat dilakukan di segala bidang dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, baik itu di kota maupun di desa. Begitu juga halnya dengan pertumbuhan ekonomi juga harus dilaksanakan di seluruh wilayah bukan hanya di kota tapi masyarakat desa juga sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah atau swasta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang di ganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dimana daerah berwenang mengatur perekonomian daerah, aktifitas perekonomian daerah diharapkan akan meningkat agar kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Perbankan di daerah akan dihadapkan pada tantangan-tantangan baru, diantaranya adalah :

- a. Peranan perbankan daerah dalam mendorong perekonomian
- b. Mengembangkan kerjasama dengan DPRD, pemerintah daerah dan kemitraan dengan pengusaha daerah terutama usaha kecil dan menengah.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan dan produk-produk perbankan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Schubungan dengan proses pendirian PT. BPR LPN Tach Baruah dalam pendiriannya harus memiliki berbagai jenis izin. Jenis izin tersebut adalah sebagai berikut:

a. Izin usaha/ izin prinsip

Dalam hal ini izin yang dimaksud adalah izin yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan tentang izin apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah Bank dalam pendiriannya. Disini izin yang dimiliki oleh PT. BPR LPN Tach Baruah adalah izin usaha yang disahkan oleh Menteri Keuangan karena pada waktu pendirian PT. BPR LPN Tach Baruah ini yang berlaku adalah Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Perbankan.

b. Izin lain yang berasal dari pemerintah antara lain:

1. Izin mendirikan Bangunan (IMB)
2. Pengukuhan badan hukum
3. Izin gangguan dan izin tempat usaha
4. Tanda daftar perusahaan

2. Berdasarkan jenis izin diatas maka pelaksanaan izin pendirian PT. BPR LPN Tach Baruah, sebelumnya PT. BPR LPN Tach Baruah ini berdiri

DAFTAR PUSTAKA

- Bacharudin Usman, SH, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, 2001, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dr.Thomas Suyatno MM, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Sun, Jakarta, 2003
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, 1993, Cetakan 4, PT. Penerbit Balai Buku Ikhtiar, Jakarta
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, 1989, Jakarta
- John M.Echols dan Hassan Ahadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedi Jakarta: 2001
- M. Andre Martin dan F.V. Bhaskara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karina, Surabaya, 2002
- M. Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, 1988, CV. Rajawali, Jakarta, Edisi 1, Cetakan 1
- Munir Fuadi, 2003, *Hukum Perbankan Moderen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ny.DRA. Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Prof. DR. Philipus M. Hadjon S.H, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Universiti Press, Surabaya, 1994
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2006
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, 1996, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sembiring Sentosa, SH. MH, *Hukum Perbankan*, CV Mander Maju, Bandung
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT. Ichatiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 2001